

Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi

Puji Asi Asih¹, Purwadi², Teguh Prasetyo²

**¹ Mahasiswa Program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Perkebunan
INSTIPER**

**² Dosen Program Studi Pasca Sarjana Magister Manajemen Perkebunan
INSTIPER**

Email Korespondensi : puji.amanahrimba19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini terkait model kemitraan lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial sebagai komitmen konservasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kemitraan, merumuskan model kemitraan lingkungan dan pembuktian komitmen perusahaan pada kegiatan konservasi.

Analisis data menggunakan data kuantitatif dan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun teknik mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Model *interaktif Miles, Huberman* dan *Saldana* digunakan dalam analisis sedangkan untuk validitas data menggunakan *triangulasi sumber*.

Faktor pendukung dalam kemitraan lingkungan ini adalah perusahaan mendapatkan kemudahan dari pemerintah maupun pendamping perhutanan sosial, memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan fungsi sosial dan ekonomi dimasyarakat, memberikan pemahaman atau pandangan kepada masyarakat, faktor penghambat yaitu minimnya peran kelompok, belum adanya kesediaan atau penerimaan masyarakat, dan kurangnya dukungan atau kontribusi dari pemerintah karena keterbatasan anggaran. Bentuk kerjasama dan komitmen kemitraan lingkungan menerapkan pola kemitraan kolaborasi multipihak dengan berkomitmen untuk mengembangkan usaha perkebunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta mengurangi resiko kebakaran dan kerusakan hutan desa.

Kata kunci : Kemitraan, Konservasi, Perhutanan Sosial, pemangku kepentingan

PENDAHULUAN

Perkebunan kelapa sawit saat ini menjadi salah satu sektor yang sangat diandalkan oleh Pemerintah Indonesia dibandingkan dengan sektor non migas lainnya. Hal ini tidak terlepas dari semakin tingginya tingkat perluasan lahan kelapa sawit diberbagai wilayah yang berdampak pada semakin tinggi produksi minyak sawit yang dihasilkan. Perusahaan perkebunan kelapa sawit pada dasarnya harus dikelola secara baik dengan memperhatikan konservasi, untuk itu pengusaha harus mengikuti regulasi kaitannya dengan ISPO/RSPO yang terdapat di dalam kawasan perkebunan. Dalam rangka mengubah arus paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang lebih mengedepankan masyarakat sebagai subyek pembangunan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan salah satu kebijakan yang mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Kemitraan konservasi sendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam, dimaknai sebagai kerjasama antara kepala unit pengelola kawasan hutan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan.

Sedangkan pendekatan secara lanskap konservasi dapat dilakukan di luar perkebunan itu sendiri yang berada di wilayah sekitar kebun seperti keberadaan hutan-hutan di desa tersebut. jadi perusahaan perkebunan sebetulnya dengan pendekatan secara lanskap tidak hanya urusan ISPO/RSPO saja tetapi juga bisa membantu membangun konservasi serta menambah nilai sosial ekonomi di lanskapnya. Perusahaan melakukan kerjasama dengan pengelola perhutanan sosial dalam satu daur sawit sesuai dengan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria). Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Agraria, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun (untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka maksimal 35 tahun).

Dalam upaya memastikan kelestarian lingkungan dan juga pembangunan ekonomi jangka panjang, perusahaan PT. BGA Group yang merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit berkomitmen untuk mendukung masyarakat melalui pendekatan kemitraan pengelolaan perhutanan sosial di beberapa desa binaan. Model pendekatan secara lanskap adalah model baru yang bertujuan ingin mengetahui kinerja berbasis lingkungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial itu sendiri melalui program kemitraan

lingkungan seperti konservasi lingkungan yang bertujuan untuk mengetahui berbagai jenis keanekaragaman hayati dari flora fauna di area kawasan hutan tersebut (UNDP, 2019). Dalam hal ini perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) Group melalui perjanjian antara pihak perusahaan dengan masyarakat selaku pemegang izin pada kawasan yang akan dijadikan kawasan konservasi, bekerjasama melakukan kemitraan konservasi dalam implementasi kegiatan utamanya, yaitu untuk pemulihan ekosistem serta pemberdayaan masyarakat setempat. Caranya melalui pendekatan kemitraan guna mengelola lanskap didalam dan disekitar batas wilayah perkebunan yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan pendapatan jangka panjang serta kelestarian lingkungan.

Tujuan dari penelitian ini mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kemitraan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dan merumuskan model kemitraan lingkungan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam bentuk kerjasama untuk tujuan konservasi dan pembuktian komitmen perusahaan pada kegiatan konservasi. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi ilmiah tentang pola kemitraan yang sesuai sebagai suatu solusi pengelolaan secara kerjasama, saling menguntungkan dan sebagai acuan model kelola yang bisa dijadikan rujukan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Penelitian dilakukan di Lokasi yang dipilih untuk penelitian Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit sebagai Komitmen Konservasi ini adalah di Wilayah lanskap PT. Bumitama Gunajaya Agro (BGA) dan masyarakat perhutanan sosial di Desa Belaban Rayak, Kecamatan Sungai Melayu dan Desa Sembelangaan, Kec. Nanga Tayap, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dengan Desa Tangkahen, Kecamatan Banama Tingang pada bulan September 2021 hingga selesai. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Kuisisioner dan Lembar pengambilan data pendukung. Survei pendahuluan dilakukan dengan menggunakan data dari perusahaan mengenai lokasi Hutan Desa yang bermitra dengan perusahaan PT.BGA yang sedang berlangsung. Lokasi yang dipilih adalah Desa Sembelangaan dan Belaban Rayak di Kabupaten Ketapang. Adapun kelompok perhutanan sosial yang tidak bermitra dengan perusahaan kelapa sawit adalah Hutan Desa Tangkahen di Kabupaten Pulang Pisau yang sudah dikaji 2019 bersama USAID Lestari.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan

data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Sumber data primer yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini antara lain, yaitu : BPSKL-KLHK Wilayah Kalimantan, Pimpinan Pusat Sustainability PT. BGA Group, Manajer Departement Konservasi, GAPKI, USAID Lestari, Pendamping/Fasilitator Kelompok Perhutanan Sosial dari PT. BGA Group, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua LPHD, Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai lembaga atau instansi secara tidak langsung melalui media perantara dan dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian, antara lain : Peraturan tentang Perhutanan Sosial (Peraturan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perhutanan Sosial), Mou Kerjasama BGA dengan Desa Belaban Rayak, Mou Kerjasama BGA dengan Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Dokumen SK Tim Patroli, SK KUPS Rehabilitasi SK KUPS Agroforestry, SK HPHD Belaban Rayak, dan SK HPHD Simpang Tiga Sembelangaan.

Metode Pengumpulan Data wawancara langsung (*In-Depth Interview*), observasi dan studi dokumen dilakukan kepada pihak perusahaan perkebunan PT.BGA (Pimpinan Pusat Sustainability PT. BGA Group, Manajer Departement Konservasi, dan Pendamping/Fasilitator KPS), BPSKL-KLHK Wilayah Kalimantan, GAPKI, USAID Lestari, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua LPHD, dan kelompok masyarakat yang telah terbentuk dengan panduan kuisisioner. Teknik dalam pengambilan sampel yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial dan Mandiri.

Kerjasama ini dilakukan pada kelompok masyarakat perhutanan sosial disesuaikan dengan kebutuhan dan menyesuaikan program tersebut dengan rencana yang telah dibuat oleh perusahaan. Sedangkan yang ingin dicapai didalam kemitraan ini untuk melakukan sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada para mitra dan para pihak yang berkepentingan terkait model kemitraan lingkungan yang berbasis pada pemberian akses pemanfaatan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan serta konservasi di Hutan Desa. Pengelolaan ini menghadapi masalah yaitu keterlanjuran sawit dan lahan garapan masyarakat dikawasan hutan desa serta faktor ekonomi sehingga masyarakat membuka dan memanfaatkan kawasan tersebut untuk meningkatkan hasil pendapatan mereka. Sedangkan masyarakat mengetahui bahwa

kawasan hutan desa tidak diperbolehkan untuk dikelola selain untuk konservasi, adapun kawasan yang terlanjur terbuka karena adanya perkebunan sawit masyarakat melalui model jangka benah sawit dikawasan hutan dengan melakukan penanaman jenis tanaman secara agroforestry.

Dalam skema konservasi, masyarakat penggarap diberikan akses pemanfaatan terhadap hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu, rehabilitasi kawasan yang terlanjur dikelola, patroli dikawasan, serta jasa lingkungan di areal kemitraan yang telah disepakati yaitu zona hutan Desa Belaban Rayak, Sungai Melayu dan Desa Sembelangaan, Simpang Tiga Sembelangaan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi role model pembinaan desa-desa yang lain disekitar kawasan konservasi hutan desa lainnya. Program kemitraan lingkungan yang terjalin antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial tentunya tidak bisa terlepas dari beberapa faktor, faktor tersebut yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat yang tidak mungkin bisa dipisahkan.

Tabel 1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kemitraan Lingkungan dengan Perusahaan dan Secara Mandiri .

Kelompok Perhutanan Sosial	
Kemitraan	
Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Kawasan Hutan dan LPHD Legal (SK HPHD dan SK LPHD Disahkan oleh Menteri KLHK) 2. KUPS disahkan KPH (P.9 Tahun 2021) 3. Pimpinan Perusahaan Mendukung Program 4. Masyarakat diberikan Lapangan Pekerjaan 5. Mendapatkan Fasilitas (Sarana dan Prasarana) dan Pendampingan 6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM	1. Kapasitas LPHD dan KUPS Minim 2. Belum Ada Inisiatif dari Kelompok LPHD dan KUPS 3. Sistem Upah Tidak Sesuai 4. Masyarakat Kurang Berminat 5. Keterlanjuran Masyarakat Bermukim dan Berkebun di Kawasan 6. Terjadinya Jual Beli Kawasan yang Menimbulkan Konflik

7. Pihak lain yang bersedia mendukung pelaksanaan kemitraan yaitu yayasan Equalizer	
Mandiri	
Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1. Kawasan Hutan dan LPHD Legal (SK HPHD dan SK LPHD Disahkan oleh Menteri KLHK) 2. Keterlibatan LPHD cukup tinggi 3. Anggota KUPS aktif dalam membantu meningkatkan potensi usaha 4. Pihak pendamping dari KPH memberikan dukungan dan fasilitasi 5. Masyarakat memiliki inisiatif secara mandiri untuk mendapatkan dana mengelola hutan desa	1. Secara finansial masih terbatas 2. Kurangnya dukungan dan partisipasi pemerintah desa 3. Terbatasnya sarana dan prasarana sebagai akses kelompok ke kawasan hutan desa

Sumber : Data Primer 2022

Berdasarkan dari analisis data diatas pada tabel 1, Faktor pendukung untuk mengelola hutan desa dengan pola kemitraan lingkungan untuk kawasan konservasi yang dilaksanakan perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun dengan cara mandiri kelompok masyarakat perhutanan sosial, pemerintah maupun pendamping perhutanan sosial dari KPH memberi kemudahan mitra yaitu perusahaan dalam upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam konsep konservasi agar dapat dilindungi dengan baik melalui, dalam pemberdayaan kelompok masyarakat perhutanan sosial dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dimasyarakat sehingga dapat menurunkan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat dan dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukkan untuk meningkatkan sumber mata pencaharian dan ekonomi masyarakat desa seperti dengan diterbitkannya Surat Hak Pengelolaan Hutan Desa serta SK Lembaga Pengelola Hutan Desa, masyarakat memiliki akses atau hak untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan tersebut sebagaimana dalam Peraturan Dirjen KSDAE Nomor : P. 6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 secara legalitas, kemudian dari perusahaan bisa memberikan pemahaman atau pandangan kepada masyarakat melalui suatu ide dalam

berbagai situasi, memberikan motivasi memecahkan berbagai masalah apabila ada sesuatu hal yang terjadi berkaitan dengan sistem pengelolaan kawasan hutan desa baik mengenai tata batas hutan desa atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga upaya pemberdayaan masyarakat untuk membangun maupun mendorong potensi apa yang dimiliki bisa dikembangkan.

Faktor penghambat yaitu minimnya peran kelompok karena kesadaran masyarakat masih rendah atau kurang menunjang, hal ini terjadi sebagian masyarakat desa kurang memiliki kesadaran misalnya sebagian masyarakat masih membuka lahan atau jual beli lahan sehingga beralih fungsi dari hutan desa menjadi lahan kebun sawit atau ladang. Padahal pemerintah secara langsung melarang untuk membuka lahan atau jual beli lahan dikawasan hutan desa, kesediaan masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap kawasan hutan desa dijadikan kawasan konservasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit karena menurut pandangan masyarakat bahwa pelaksanaan tersebut hanya sebagai alasan perusahaan agar perusahaan lebih mudah untuk mengambil alih atau merampas kawasan hutan desa menjadi kawasan produksi kelapa sawit sehingga nanti hutan desa tersebut akan beralih fungsi, kurang dukungan atau kontribusi dari pemerintah kabupaten atau pemerintah desa disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam memberikan sarana penunjang yang dikehendaki oleh kelompok masyarakat namun pemerintah tetap memberikan dukungan melalui pendampingan atau memberikan fasilitator agar masyarakat dapat diberikan pelatihan, edukasi, serta ilmu pengetahuan terkait pengelolaan kawasan hutan desa dengan baik.

Bentuk Program Kerjasama Kemitraan Lingkungan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial:

Program Kerjasama Kemitraan Lingkungan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial		
Bermitra dengan Perusahaan		Mandiri
1. Sungai Melayu Konservasi HD : Rehabilitasi Ekosistem HD	1. Simpang Tiga Sembelangaan 2. Rehabilitasi dan Pengkayaan Ekosistem Hutan Desa 3. Peningkatan Kapasitas Lembaga dan SDM LPHD	1. Desa Tangkahen 2. Penanggulangan kebakaran 3. Pendampingan Administrasi 4. Rehabilitasi dan Pengkayaan Ekosistem HD
2. Peningkatan dan Pemanfaatan Fungsi Areal HD		
3. Pengembangan Bisnis : Membuka dan		

Membantu Pemasaran Jasa Tata Air	4. Pengamanan dan Perlindungan HD	5. Kegiatan Pemanfaatan HHK dan HHBK
4. Perlindungan dan Pengamanan HD dari Ancaman Eksternal dan Internal	5. Pendampingan Administrasi	6. Pelatihan dan Kunjungan Belajar
5. Pengembangan Kelembagaan dalam pengelolaan HD	6. Penanaman	7. Sarana dan Prasarana Pengadaan Peralatan Kerja

Sumber Data Primer 2022

Berdasarkan tabel 3, diatas disimpulkan bahwa bentuk kemitraan ini selain untuk kawasan konservasi desa juga sebagai kawasan HCV/NKT perusahaan yang berada diluar kawasan HGU perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat disekitar hutan desa melalui pemberdayaan masyarakat, model kemitraan ini bisa dijadikan model baku dengan menerapkan model kemitraan mutualistik melalui pola kemitraan kolaborasi multipihak, di karenakan adanya saling percaya dan saling menguntungkan serta komitmen perusahaan dalam melakukan pendampingan diantara kedua belah pihak, melalui kontrak perjanjian kerjasama dengan dibuktikannya beberapa program atau rencana kerja yang sudah terlaksana meskipun masih belum terlihat jelas hasil dari kerjasama.

Data Pendukung Keanekaragaman Hayati dan Penilaian Integritas Hutan Desa Belaban Rayak dan Desa Simpang Tiga Sembelangaan

Penilaian integritas hutan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat PS Hutan Desa Simpang Tiga Sembelangaan dilapangan diketahui bahwa, keberadaan 20 karakteristik struktur hutan dan bukti tidak adanya 20 dampak atau ancaman terhadap hutan. Dari sini masyarakat mengumpulkan data menjadi 13 plot dengan nilai rata-rata untuk semua plot adalah 27,24 jenis spesies yang melimpah hutan desa tersebut adalah jambu merah, kamasulan berdaun besar, jambu putih, mahang kirik dan langsung burung untuk jenis pohon DBH > 5 cm dan kamasulan daun kecil, bengkirai, kamasulan daun besar, jambu putih dan kalapapa untuk jenis spesies bibit tanaman yang melimpah. Sedangkan hasil penilaian integritas hutan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat PS Hutan Desa Belaban Rayak dilapangan diketahui bahwa, keberadaan 20 karakteristik struktur hutan dan bukti tidak adanya 20 dampak atau ancaman terhadap hutan. Dari sini masyarakat mengumpulkan data menjadi menjadi 13 plot

dengan nilai rata-rata untuk semua plot adalah 14,85. jenis spesies yang melimpah hutan desa tersebut adalah pulai, ubar/betapai, tarap, Kumpang, dan sungkai untuk jenis spesies kelimpahan pohon dengan DBH > 5 cm dan jenis bibit tanaman yang melimpah adalah ubar/betapai, penyolang bintang, kalapapa, jambu putih dan belawan putih. Untuk pengolahan data keanekaragaman hayati dan FIA pada hutan desa Tangkahan belum dilakukan dikarenakan belum ada kemitraan secara pasti, yang sudah dilakukan hanya pendataan karbon secara partisipatif, pendataan yang memerlukan anggaran masih belum dilaksanakan menunggu relawan yang mau mengerjakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang berjudul Model Kemitraan Lingkungan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial sebagai Komitmen Konservasi, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor pendukung untuk mengelola hutan desa dengan pola kemitraan lingkungan yaitu : kemudahan mitra yaitu perusahaan dalam upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan dalam konsep konservasi, Memberikan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi dimasyarakat sehingga dapat menurunkan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat dan dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukkan untuk meningkatkan sumber mata pencaharian dan ekonomi masyarakat desa, dan Memberikan pemahaman atau pandangan kepada masyarakat melalui suatu ide dalam berbagai situasi, memberikan motivasi memecahkan berbagai masalah apabila ada sesuatu hal yang terjadi berkaitan dengan sistem pengelolaan kawasan hutan desa baik mengenai tata batas hutan desa atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat
2. Faktor penghambat untuk mengelola hutan desa dengan pola kemitraan lingkungan yaitu : minimnya peran kelompok karena kesadaran masyarakat masih rendah atau kurang menunjang, kesediaan masyarakat atau penerimaan masyarakat terhadap kawasan hutan desa dijadikan kawasan konservasi oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit karena menurut pandangan masyarakat bahwa pelaksanaan tersebut hanya sebagai alasan perusahaan untuk mengambil alih atau merampas kawasan hutan desa menjadi kawasan produksi dan urang dukungan atau kontribusi dari pemerintah kabupaten atau pemerintah desa disebabkan karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

3. Bentuk kerjasama dan komitmen kemitraan lingkungan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial dalam mengelola kawasan hutan ke arah konservasi yaitu : Bentuk kemitraan ini selain untuk kawasan konservasi desa juga sebagai kawasan HCV/NKT perusahaan yang berada diluar kawasan HGU perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, dan mensejahterakan masyarakat disekitar hutan desa melalui pemberdayaan masyarakat, Keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang memiliki kewajiban untuk memulihkan kondisi kawasan hutan meskipun diluar dari HGU karena memperhatikan produksi perkebunan yang berkelanjutan dengan memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan yang mereka miliki secara bersama perusahaan mendapatkan nilai tambah yang sangat baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BGA Group dengan kelompok masyarakat perhutanan sosial berkomitmen untuk mengembangkan usaha perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan selama hasilnya perkebunannya diterima dipasar nasional maupun internasional.
4. Penilaian integritas hutan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat PS Hutan Desa Simpang Tiga Sembelangaan dilaporkan diketahui bahwa nilai rata-rata untuk semua plot adalah 27,24 jenis spesies yang melimpah hutan desa tersebut adalah jambu merah, kamasulan berdaun besar, jambu putih, mahang kirik dan langsung burung untuk jenis pohon DBH > 5 cm dan kamasulan daun kecil, bengkirai, kamasulan daun besar, jambu putih dan kalapapa untuk jenis spesies bibit tanaman yang melimpah dan diambil termasuk jenis fauna yang masih ada dikawasan hutan desa yang telah diidentifikasi yaitu jenis burung seperti (burung hantu, kolompio, cinenen, enggang, sikatan, elang dan burung duit), landak, babi hutan, kucing batu, dan rusa. Sedangkan Hasil penilaian integritas hutan yang telah dilakukan oleh kelompok masyarakat PS Hutan Desa Belaban Rayak nilai rata-rata untuk semua plot adalah 14,85. jenis spesies yang melimpah hutan desa tersebut adalah pulai, ubar/betapai, tarap, Kumpang, dan sungkai untuk jenis spesies kelimpahan pohon dengan DBH > 5 cm dan jenis bibit tanaman yang melimpah adalah ubar/betapai, penyolang bintang, kalapapa, jambu putih dan belawan putih dan termasuk jenis fauna yang masih ada dikawasan hutan desa yang telah diidentifikasi yaitu jenis babi hutam, kijang, macan akar, landak, musang, kucing batu, burung elang, burung murai, haruwei, trenggiling dan burung punai tanah/kebenat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S dan Hermawan, H. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan antara Petani Budidaya Jamur Tiram dengan CV. ASA Agro Corporation. Journal Agrosience Vol. 7 No. 1.
- Cristisnto, J. 2014. PWKL4220- Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Edisi 1/ 3 SKS/ Modul 1-9. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia.
- Maimunah, S., Amin, A, M., dan Lubis, A. F. P. *et al.* 2022. Studi Kemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Hutan Desa Sembelangaan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hutan Tropis Vol 10, No 1, Tahun 2022.
- Maimunah, S., Amin, A, M., dan Lubis, A. F. P. *et al.* 2022. Studi Kemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat Hutan Desa Balaban Rayak Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Hutan Tropis Vol 10, No 2, Tahun 2022.
- Rahmatullah, 2012. Model Kemitraan Pemerintah dengan Perusahaan dalam Mengelola CSR : Studi Kasus di Kota Cilegon. Dinas Sosial Provinsi Banten. Jurnal Informasi Vol. 17, No. 01, Tahun 2012.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R & D*. Bandung : ALFABETA.